

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Model atau cara pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para petugas LPKA Kelas I Kutoarjo dalam melakukan pembinaan serta memenuhi hak-hak anak didik pemasyarakatan mengacu pada Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan-peraturan pelaksanaan lain yang dijadikan pedoman dan pelaksanaan. Hak yang telah diberikan oleh LPKA Kelas I Kutoarjo antara lain hak memperoleh Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pelatihan, Pembimbingan dan Pendampingan, serta Pengurangan Masa Pidana (Remisi). Adapun hak yang belum dipenuhi antara lain, Hak untuk Memperoleh Asimilasi, Hak untuk Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga, Hak mendapatkan Cuti Bersyarat, dan Hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.
2. Dalam prakteknya tidak dipungkiri banyak sekali kendala untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan. Adanya faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, seperti sarana dan prasaranan yang

kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya dana untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, tingkat kesadaran anak didik masyarakat yang masih lemah, dan sikap dari masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo juga melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang muncul dalam proses pembinaan tersebut, walaupun tidak semua kendala tersebut dapat teratasi, namun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, tetap berusaha secara maksimal agar pembinaan yang mereka lakukan tidak mencederai hak anak didik masyarakat sedikitpun.

B. SARAN

Setelah penulis memaparkan uraian penelitian, maka penulis ingin memberikan saran dan masukan untuk memaksimalkan dalam memenuhi hak anak didik masyarakat selama menjalani masa pidana di LPKA Kelas I Kutoarjo adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Pusat lebih memperhatikan LPKA Kelas I Kutoarjo, dengan menambah sarana dan prasarana, seperti menambah ruang kelas, dan memasang PAM, sehingga kebersihan dan kesehatan anak didik masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi. Lalu menambah sumber daya manusia yang dibutuhkan, contohnya dengan ditetapkannya pengajar yang profesional (bukan sukarelawan) agar anak didik masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak,

sehingga mereka tetap dapat bersaing dalam dunia pendidikan, ketika mereka sudah keluar nanti. Selain itu, tenaga medis dirasa perlu untuk ditambah, karena tenaga medis di LPKA Kelas I Kutoarjo hanya 1 orang. Hal terpenting yang harus diperhatikan pemerintah adalah dengan memperhatikan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh anak didik pelayaran, karena tanpa adanya anggaran yang cukup pembinaan tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan pembinaan tidak akan terwujud secara maksimal.

2. Hendaknya dibuat Peraturan yang dikhususkan untuk anak didik pelayaran mengenai cara pengklasifikasiannya, sehingga dalam melakukan klasifikasi, Anak Didik Pelayaran tidak harus mengikuti peraturan hasil pilah-pilah, dari peraturan yang sebenarnya diperuntukan untuk narapidana dewasa.
3. Hendaknya diseriuskan atau diprogramkan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para praktisi dan akademisi hukum, maupun mahasiswa ilmu hukum terhadap masyarakat, tentang mantan narapidana dan mantan anak didik pelayaran, agar masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata dan mengucilkan mantan narapidana dan mantan anak didik pelayaran.